Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Lampiran XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas limpahan rahmat serta ridho-Nya kami telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga tahun 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah dokumen perencanaan yang berisi target capaian dan indikator kinerja sebagai acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan dalam rangka mewujudkan suatu Pemerintahan yang akuntabel.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharap saran dan tanggapan yang positif untuk kesempurnaan penyusunan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Salatiga, September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA

YAYAT NURHAYAT, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740416 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Dasar Pertimbangan 4

1.4 Maksud dan Tujuan 4

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 11

2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja 13

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18

BAB V : PENUTUP 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Merupakan suatu konsep dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahan program dan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintahan yang terkecil, yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dan didasarkan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dalam upaya mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tentram dan aman.

Pada era reformasi, pemerintah pusat mendorong kemandirian daerah melalui otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang sudah ditetapkan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Proses penyusunan Perubahan Renja SKPD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan/pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isue-isue penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu, berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD dan selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Landasan dasar penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pemberian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.
30. Perwali 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan RKPD 2025

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan Perubahan Renja Satuan Polisi tahun 2025 disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan pengurangan kegiatan, target kinerja dan pagu kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat skala prioritas dalam rangka mensukseskan visi "Terwujudnya kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia".

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.4.1. Maksud

1. Menetapkan dokumen perubahan perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dalam melakasanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
2. Menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan berdasarkan anggaran.

1.4.2. Tujuan

1. Tersusunnya perubahan rencana tindakan yang merupakan penyesuaian dari hasil rasionalisasi anggaran dalam rangka defisit anggaran Kota Salatiga; serta hasil evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan perubahan;
2. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan tahunan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan;

3. Mempertajam prioritas program dan kegiatan serta kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun;
4. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai kedalam program dan kegiatan;
5. Sebagai alat kontrol, evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

1.5. Sistematika Penyusunan

Perubahan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari hasil evaluasi setiap triwulan. Laporan hasil evaluasi tersebut meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Dari 23 sub kegiatan sudah ada 9 sub kegiatan yang berhasil mencapai lebih dari 50% penyerapannya, 10 sub kegiatan masih di bawah 50% dan 4 sub kegiatan lainnya masih 0%.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Dari 6 sub kegiatan sudah ada 1 sub kegiatan yang berhasil mencapai lebih dari 50% penyerapannya, 5 sub kegiatan masih di bawah 50%
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Dari 4 sub kegiatan belum ada sub kegiatan yang berhasil mencapai lebih dari 50% penyerapannya.

Bahwa Renja Perubahan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2025 pada umumnya sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKA-DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2025, serta evaluasi persiapan pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2025.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana tabel dibawah ini :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

KODE	Program, Indikator Kinerja Program (Outcome)	Indikator	Satuan	Target Akhir RPD Kota Salatiga (Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD	
										I		II					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**11.447.600.000**		**12.674.472.103**		**13.431.382.446**	-	**2.823.605.548**	-	**6.019.173.409**	-	**5.972.080.809**	-	**18.646.552.912**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**10.087.600.000**		**10.616.126.053**		**11.358.516.546**		**2.711.262.048**		**5.617.641.809**		5.617.641.809		16.233.767.862
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP		%	88,00		87,09		88,00		87,09					0		-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	**15.000.000**	100	**14.883.650**	100	**22.032.000**	**36,73**	**2.976.000,00**	**56,77**	**8.799.250**	**38,17**	**8.799.250**	**38,17**	23.682.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan	laporan	7	15.000.000	100	14.883.650	7	12.032.000	38,17	2.976.000,00	74,86	8.799.250		8.799.250		23.682.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai 46 orang. (SKP dan Penilaian Angka Kredit JFT)	orang	46	-		-	46	10.000.000	35,00	-	35,00			0		-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	**6.082.960.000**	100	**5.869.446.262**	100	**6.206.950.152**	**35,00**	**1.463.246.229,00**	**64,90**	**3.254.728.135**		3.254.728.135		9.124.174.397
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang.(Kebutuhan Gaji dan Tunjangan 14 bulan TPP 14 bulan)	orang	46	6.058.960.000	100	5.849.286.262	46	6.186.790.152	35,00	1.463.246.229,00	65,00	3.254.728.135		3.254.728.135		9.104.014.397
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor PPK dan Bendahara 12 bulan	bulan	12	24.000.000	100	20.160.000	12	20.160.000	35,00	-	35,00			0		20.160.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	100	**30.000.000**	100	**31.907.089**	100	**42.000.000**	**35,00**	**3.015.339,00**	**35,00**	**3.015.339**		3.015.339		34.922.428
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (6 kendaraan 1 gedung)	unit	7	30.000.000	100	31.907.089	7	42.000.000	35,00	3.015.339,00	35,00	3.015.339		3.015.339		34.922.428
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	**351.240.000**	100	**352.221.600**	100	**519.128.000**	**35,00**	**47.867.800,00**	**43,79**	**144.034.950**		144.034.950		496.256.550
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Extra Fooding 140 orang 12 bulan	orang	140	306.240.000	100	289.886.600	144	304.128.000	35,00	47.867.800,00	50,00	144.034.950		144.034.950		433.921.550
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Untuk Banpol baru 43 orang	orang	43	45.000.000	100	17.438.000	43	215.000.000	35,00	-	35,00			0		17.438.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemusnahan barang kena cukai ilegal pecahan dari sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota										35,00			0		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	**187.280.000**	100	**139.604.900**	100	**142.916.500**	**50,20**	**63.447.000**	**67,71**	**76.216.500**		76.216.500		215.821.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik 5 jenis	jenis	15	5.000.000	100	4.983.400	1 paket	5.000.000	100,00	4.911.500,00	100,00	4.911.500,00		4.911.500		9.894.900
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan 33jenis	jenis	40	15.000.000	100	15.000.000	1 paket	15.000.000	90,62	12.835.500,00	100,00	14.810.500		14.810.500		29.810.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK 28 jenis	jenis	90	40.000.000	100	23.996.000	1 paket	28.825.000	96,48	28.825.000,00	100,00	28.825.000		28.825.000		52.821.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan 4 jenis	jenis	15	15.000.000	100	5.909.300	1 paket	13.472.500	35,00	1.635.000,00	35,00	1.792.500		1.792.500		7.701.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran 12 bulan	eksempla	2	2.280.000	100	2.083.000	1 paket	2.220.000	35,00	380.000,00	52,00	1.140.000		1.140.000		3.223.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Snack dan Makan Tamu 12 bulan, Kunjungan ke Mako damkar meningkat	bulan	12	10.000.000	100	6.960.000	1 tahun	24.000.000	35,00	6.000.000,00	62,00	12.000.000		12.000.000		18.960.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya SPPD luar Daerah 12 bulan	bulan	12	100.000.000	100	80.673.200	1 tahun	54.399.000	35,00	8.860.000,00	50,00	12.737.000		12.737.000		93.410.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**0**	**0**	**0**	100	**387.380.000**	**5 unit**	**169.844.000**	**100,00**	**157.095.000**	**100,00**	**157.095.000**		157.095.000		544.475.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	100	387.380.000	5 unit	169.844.000	100,00	157.095.000,00	100,00	157.095.000,00		157.095.000		544.475.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**%**	**100**	**2.755.000.000**	**100**	**3.198.202.522**	**100**	**3.409.266.914**	**35,00**	**913.359.380**	**92,07**	**1.811.423.276**		1.811.423.276		5.009.625.798
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	jenis	2	5.000.000	100	3.300.000	1 tahun	3.304.000	35,00	-	45,00	1.500.000		1.500.000		4.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Telepon dan Air 12 bulan	jenis	3	50.000.000	100	29.194.888	1 tahun	50.000.000	35,00	7.112.563,00	50,00	14.011.653		14.011.653		43.206.541
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Repeater 1 unit	0	0	-	100	11.768.000	1 tahun	12.000.000	35,00	2.500.000,00	50,00	3.600.000		3.600.000		15.368.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbanyarnya Honor Banpol PP 94 orang 14 bulan	tahun	1	2.700.000.000	100	3.153.939.634	1 tahun	3.343.962.914	35,00	903.746.817,00	54,79	1.792.311.623		1.792.311.623		4.946.251.257
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**%**	**100**	**666.120.000**	**100**	**622.480.030**		**846.378.980**	**35,00**	**60.255.300**	**50,02**	**162.329.359**		162.329.359		784.809.389
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan 5 unit 12 bulan	unit	32	150.000.000	100	129.851.570	32	209.348.700	35,00	11.119.300,00	48,86	24.687.300		24.687.300		154.538.870
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan 10 unit patroli/operasional satpol 3 ransus damkar 12 bulan	unit	19	450.000.000	100	433.446.560	13	549.212.580	35,00	42.104.000,00	50,98	111.875.059		111.875.059		545.321.619
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan 7 AC, 12 Ht 27 printer dan 26 komputer	unit	63	46.120.000	100	34.327.000	63	55.477.700	35,00	7.032.000,00	53,58	25.767.000		25.767.000		60.094.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung 1 unit	m2	400	69.200.000	100	24.854.900	300	32.340.000	35,00	-	35,00			0		24.854.900
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**1.040.000.000**		**1.898.125.450**		**1.869.100.200**		**99.891.500**		**351.159.600**		304.067.000		2.199.192.450
	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da		**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**					0		-
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**					23.520.000		23.520.000

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**%**	**100**	**650.000.000**	**100**	**1.725.839.950**	**100**	**1.705.659.700**	**35,36**	**80.166.500**	**43,63**	**304.067.000**		208.057.500		1.933.897.450
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	%	0,00	-	100	216.614.450	100	860.123.000	35,36	36.810.500,00	39,17	72.489.500		47.092.600		263.707.050
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Insentif Linmas 1500 orang (@300.000), Pembinaan Linmas Tk. Kota , Pemberdayaan Linmas Tk. Kota, dan Inataru	kegiatan	8,00	150.000.000	100	562.289.000	8	542.856.600	35,00	-	35,87	23.520.000		23.520.000		585.809.000
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Patroli Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Pengawasan Wilayah , Pengamanan HUT Salatiga dan HUT RI dan Pengamanan Inataru	kegiatan	8,00	500.000.000	100	946.936.500	8	302.680.100	35,00	43.356.000,00	70,23	208.057.500		208.057.500		1.154.994.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		**%**	**100,00**	**340.000.000**	**100**	**169.285.500**	**100**	**163.440.500**	**35,00**	**19.725.000**	**68,75**	**47.092.600**		47.092.600		216.378.100
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Perda dan Perkada 4 kecamatan	orang	240,00	90.000.000	100	50.249.100	240	42.165.900	35,00	-	50,00	13.625.600		13.625.600		63.874.700
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Operasi Yustisi dan Nonyustisi Ketertiban Kota 40 kali	kegiatan	2,00	100.000.000	100	73.162.200	2	72.297.100	15,54	12.080.000,00	53,15	18.240.000		18.240.000		91.402.200
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Operasi Tipiring 3 kali dan Monitoring Lapangan 32 kali	kegiatan	16,00	150.000.000	100	45.874.200	16	48.977.500	35,00	7.645.000,00	47,21	15.227.000		15.227.000		61.101.200
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**kegiatan**	**2,00**	**50.000.000**	**0**	-	**2**	-	**35,00**	**0**				0		-
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kegiatan pembinaan PPNS dan aparat penegak perda 2 kegiatan	kegiatan	2,00	50.000.000	0	-	2	31.392.000	35,00	-				0		-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, adapun dalam BAB II Pasal 3 huruf d angka 4 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga "Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Urusan Kebakaran", Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 - 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	100%			
2	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%		95%	100%				100%	100%			
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	100%			

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Perubahan Renja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurn aan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Salatiga dilakukan dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan.

Pada awal tahun dilaksanakan efisiensi kegiatan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selain melaksanakan efisiensi juga mengusulkan penambahan anggaran untuk kekurangan gaji dan honorarium Banpol. Kemudian berdasarkan analisis kebutuhan anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp. 457.496.431,- Secara ringkas dapat dilihat pada tabel Perubahan Renja Tahun 2025 dibawah ini, Sedangkan untuk detail perubahan anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA Satpol PP TAHUN 2025

No	Uraian	Pagu
1.	Pagu Penetapan 2025	13.080.891.666
2.	Efisiensi dan Penambahan Gaji	350.490.780
3.	Tambahan untuk Kekurangan Gaji	1.457.496.431
4.	TOTAL	14.888.878.877

Review terhadap Perubahan RKPD 2025

Review terhadap Perubahan RKPD 2025

Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan	7	12.032.000	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan	7	12.032.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai 46 orang. (SKP dan Penilaian Angka Kredit JFT)	46	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai 46 orang. (SKP dan Penilaian Angka Kredit JFT)	46	10.000.000
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang.(Kebutuhan Gaji dan Tunjangan 14 bulan TPP 14 bulan)	46	7.642.786.583	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang.(Kebutuhan Gaji dan Tunjangan 14 bulan TPP 14 bulan)	46	6.338.995.263
1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor PPK dan Bendahara 12 bulan	12	20.160.000	1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Honor PPK dan Bendahara 12 bulan	12	20.160.000
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.05.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (6 kendaraan 1 gedung)	7	42.000.000	1.05.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (6 kendaraan 1 gedung)	7	42.000.000
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.05.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Extra Fooding 140 orang 12 bulan	140	304.128.000	1.05.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Extra Fooding 140 orang 12 bulan	140	304.128.000
1.05.01.2.05.02.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.05.01.2.05.02.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Untuk Banpol baru 43 orang	0	0	1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Untuk Banpol baru 43 orang	0	0
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemusnahan barang kena cukai ilegal pecahan dari sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		98.373.900	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Pemusnahan barang kena cukai ilegal pecahan dari sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		98.373.900
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik 5 Jenis	1	5.000.000	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Alat Listrik 5 Jenis	1	5.000.000
1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan 33Jenis	1	15.000.000	1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Alat Kebersihan 33Jenis	1	15.000.000
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK 28 Jenis	1	28.825.000	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya ATK 28 Jenis	1	28.825.000
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan 4 jenis	1	15.286.800	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Bahan Cetakan 4 Jenis	1	15.286.800
1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran 12 bulan	1	2.220.000	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Koran 12 bulan	1	2.220.000
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Snack dan Makan Tamu 12 bulan, Kunjungan ke Mako damkar meningkat	1	36.000.000	1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Snack dan Makan Tamu 12 bulan, Kunjungan ke Mako damkar meningkat	1	36.000.000
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya SPPD luar Daerah 12 bulan	1	54.399.000	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya SPPD luar Daerah 12 bulan	1	54.399.000
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	1	3.304.000	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Materai	1	3.304.000
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Telepon dan Air 12 bulan	1	51.500.000	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya Tagihan Listrik, Telepon dan Air 12 bulan	1	51.500.000
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Repeater 1 unit	1	12.000.000	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Repeater 1 unit	1	12.000.000
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbanyarnya Honor Banpol PP 94 orang 14 bulan dengan standart umr 2024 sebesar 2.378.951, belum menggunakan standar umk tahun 2025 sebesar Rp 2.533.538.	1	3.343.962.914	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbanyarnya Honor Banpol PP 94 orang 14 bulan dengan standart umr 2024 sebesar 2.378.951, belum menggunakan standar umk tahun 2025 sebesar Rp 2.533.538. Kebutuhan sebesar 3.596.624.938 masih kurang sebesar 210.759.430	1	3.551.434.234

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 12 jenis,	1	332.909.700		1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 12 jenis,	1	332.909.700
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan 5 unit 12 bulan	5	209.348.700		1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan 5 unit 12 bulan	5	209.348.700
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan 10 unit patroli/operasional satpol 3 ransus damkar 12 bulan	13	549.212.580		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan 10 unit patroli/operasional satpol 3 ransus damkar 12 bulan	13	549.212.580
1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel 2 jenis		0		1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel 2 jenis		0
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan 7 AC, 12 Ht 27 printer dan 26 komputer	1	55.477.700		1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan 7 AC, 12 Ht 27 printer dan 26 komputer	1	55.477.700
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung 1 unit	1	32.340.000		1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung 1 unit	1	32.340.000
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	761.749.100,00		1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	761.749.100,00
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Insentif Linmas 1500 orang (@300.000), Pembinaan Linmas Tk. Kota , Pemberdayaan Linmas Tk. Kota, dan Inataru	8	542.856.600		1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Insentif Linmas 1500 orang (@300.000), Pembinaan Linmas Tk. Kota , Pemberdayaan Linmas Tk. Kota, dan Inataru	8	542.856.600
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Patroli Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Pengawasan Wilayah , Pengamanan HUT Salatiga dan HUT RI dan Pengamanan Inataru	10	340.800.100		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Patroli Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Pengawasan Wilayah , Pengamanan HUT Salatiga dan HUT RI dan Pengamanan Inataru	10	437.120.100
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Perda dan Perkada 4 kecamatan	1	42.165.900		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Perda dan Perkada 4 kecamatan	1	42.165.900
1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Operasi Yustisi dan Nonyustisi Ketertiban Kota 40 kali	2	72.297.100		1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Operasi Yustisi dan Nonyustisi Ketertiban Kota 40 kali	2	72.297.100
1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Operasi Tipiring 3 kali dan Monitoring Lapangan 32 kali	12	48.977.500		1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Operasi Tipiring 3 kali dan Monitoring Lapangan 32 kali	12	48.977.500
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kegiatan pembinaan PPNS dan aparat penegak perda 2 kegiatan	0	0		1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kegiatan pembinaan PPNS dan aparat penegak perda 2 kegiatan	0	0
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran 12 bulan	30	125.139.500		1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran 12 bulan	30	125.139.500
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 12 bulan	1	23.448.000		1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 12 bulan	1	23.448.000
1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		0		1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		0
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarpras Damkar 8 jenis	15	30.178.200		1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarpras Damkar 8 jenis	15	30.178.200
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten lain dalam bentuk perjanjian kerjasama penanganan kebakaran dan non kebakaran selama 12 bulan		0		1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten lain dalam bentuk perjanjian kerjasama penanganan kebakaran dan non kebakaran selama 12 bulan		0
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				
1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi	5	25.000.000		1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi	5	25.000.000
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				
1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				
TOTAL			14.888.878.877		TOTAL			13.888.878.877

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Salatiga, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah sebagai OPD yang mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakata dan Perlindungan Masyarakat di Kota Salatiga.

Sejalan dengan Misi ke 3 **Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah,** maka program dan kegiatan yang dirancang Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2025 terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

a.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

a.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

a.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a.3.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

a.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a.4.1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

a.4.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

a.4.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

a.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

a.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

a.5.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

a.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

a.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

a.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

a.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

b.1.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

b.1.3. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

b.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b.2.2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b.2.3. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

c.1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.1.1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.1.2. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

c.1.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

c.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

c.1.1. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
				14.888.878.877
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.779.946.877**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**22.032.000**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**7.662.946.583**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.642.786.583
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.160.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**42.000.000**
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**402.501.900**
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	304.128.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98.373.900
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**156.730.800**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.825.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.286.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.399.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**332.909.700**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.909.700
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**3.410.766.914**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.304.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.500.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.343.962.914
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**846.378.980**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.348.700
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	549.212.580

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.477.700
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.340.000
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.808.846.300**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**1.645.405.800**
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	761.749.100
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	542.856.600
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	340.800.100
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		**163.440.500**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.165.900
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72.297.100
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48.977.500
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**203.765.700**
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**178.765.700**
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.139.500
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	23.448.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	30.178.200
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**25.000.000**

			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000

Perubahan Target Kinerja IKU dan IKD

NO	"Indikator Kinerja Utama (IKU)" Penetapan	Satuan	Target 2025	"Indikator Kinerja Utama (IKU)" Perubahan	Target Perubahan 2025
1	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100

NO	"Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)" Penetapan	Satuan	Target 2025	"Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)" Perubahan	Target Perubahan 2025
1	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	Indeks Penyelenggaraan Ketetentraman dan Ketertiban Umum	100
2	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran	100
3				Indeks Penyelenggaran Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	100

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							14.076.776.196,00	13.000.991.866,00	14.888.878.877,00	812.102.661,00							11.922.609.089,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.076.776.196,00	13.000.991.866,00	14.888.878.877,00	812.102.661,00							11.922.609.089,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.076.776.196,00	13.000.991.866,00	14.888.878.877,00	812.102.661,00							11.922.609.089,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				80 %	80 %	12.290.737.996,00	10.704.700.866,00	12.676.260.877,00	-2.153.137.996,00							10.137.609.089,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pegawai Terealisasinya Laporan Capaian Kinerja atau Antaar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kabupaten/Kota Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SAKD				40 Orang 7 Laporan	40 Orang 7 Laporan	22.052.000,00	22.032.000,00	22.052.000,00	0,00			-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Sasaran PP		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SAKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	12.032.000,00	12.032.000,00	12.032.000,00	0,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99 Laporan	99 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terselenggara Honor-Um BPK dan Sekretariat				12 Bulan 40 Orang	12 Bulan 40 Orang	6.739.038.994,00	5.526.645.153,00	7.662.840.583,00	923.890.619,00			-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		8.082.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	6.718.898.994,00	5.508.485.153,00	7.642.784.583,00	923.890.619,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.076.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00			-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	7 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				145 Unit	144 Unit	531.946.000,00	519.128.000,00	402.501.800,00	-132.044.100,00			-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		351.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				145 Unit	144 Unit	315.746.000,00	304.128.000,00	304.128.000,00	-11.618.000,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			326.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				140 Orang	43 Orang	216.800.000,00	216.000.000,00	0,00	-216.800.000,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	60 Orang	0,00	0,00	98.373.900,00	98.373.900,00	Kota Salatiga, Bentuk Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	06 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Barang dan Peralatan Pemeliharaan/Jasa Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terlaksanya Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksanya Koordinasi dan/atau Konsultasi Luar/Pelaporan Bangunan Kantor Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	205.498.500,00	197.731.000,00	156.730.600,00	+48.567.700,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		197.260.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.050.500,00	30.050.500,00	28.825.000,00	+1.225.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	+3.473.600,00	15.286.600,00	286.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			2.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.026.000,00	108.026.000,00	34.399.000,00	-63.629.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	415.542.000,00	159.844.200,00	332.909.700,00	-77.632.300,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	415.542.000,00	159.844.200,00	332.909.700,00	-77.632.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggara Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	3.451.178.338,00	3.409.266.914,00	3.410.760.514,00	-40.411.364,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		2.755.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.314.600,00	3.304.000,00	3.304.000,00	-10.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	81.500.000,00	1.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selisih/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.355.855.508,00	3.343.992.914,00	3.343.992.914,00	-11.862.594,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			2.720.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya dan Terbayar Pajaknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	13 Unit 1 Unit 32 Unit 63 Unit	886.075.224,00	856.015.800,00	846.378.880,00	-39.696.224,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		716.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	209.348.700,00	209.348.700,00	209.348.700,00	0,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	670.168.300,00	668.617.100,00	649.212.580,00	-20.955.720,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	63 Unit	55.578.224,00	55.477.700,00	55.477.700,00	-100.524,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			46.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.980.000,00	33.340.000,00	32.340.000,00	-12.640.000,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 08 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			48.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 100 % %	100 100 % %	1.482.104.990,00	3.101.461.305,09	1.909.846.300,00	-482.104.990,09							1.048.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum skala 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pendataan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 Tahun	1 Tahun	1.042.104.000,00	1.022.641.305,00	1.043.405.800,00	533.301.200,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				-	4 Dokumen	0,00	860.125.000,00	761.749.100,00	761.749.100,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	8 Dokumen	600.000.000,00	595.092.600,00	642.856.000,00	-57.143.400,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pendataan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pendataan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				8 laporan	8 laporan	432.104.600,00	387.428.700,00	340.800.100,00	-151.304.500,00	Kota Saketa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota Terlaksananya Penanyangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Secara SOP Terlaksananya Penggunaan yang Diskusikan Terhadap Kejahatan Terlaksananya Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Evaluasi Penegakan Perkotan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Kali 1 Tahun	100 % 1 Kali 1 Tahun	340.003.000,00	247.428.000,00	163.640.500,00	-176.544.500,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0015	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selisih/Bertambah (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	57.042.000,00	22.165.500,00	-67.834.100,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.02.2.02.0011	Penyelenggaran Atas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	2 Laporan	190.000.000,00	109.680.000,00	73.297.100,00	-77.702.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Ditindaklanjuti Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	80.506.000,00	48.977.500,00	-51.022.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.02.2.03	Pemenuhan Penyelit Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pendemban Kecakitas dan Karier PPNS				1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	31.392.003,00	0,00	-50.000.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Pemegang Perda				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	31.392.003,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	1.06.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Presentase kelengkapan Sarana Prasarana Damkar yang memadai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 67 65 % % %	100 85 15 100 100 % % Meningkat/persen %	393.943.900,00	234.729.500,00	393.765.700,00	-41.056.400,00							345.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Terfasilitasinya Kesiapsiagaan Petugas Pmk dan Pemadam/Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedia Kapasitas Kesiapsiagaan Petugas Pmk dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Kegiatan 1 Tahun	100 % 1 Tahun	278.943.900,00	199.728.500,00	178.765.700,00	-100.177.900,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.01.0002	Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pmk dan Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	125.139.500,00	-4.860.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pmk dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	23.448.000,00	-1.552.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.01.0007	Pemotongan Agresifi Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kebakaran Sesuai dan Ahlidi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				2 Orang	2 Orang	24.213.000,00	0,00	0,00	-24.213.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.3.01.0019	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai dan Layak Pakai Standar Teknis Terkait				15 Unit	15 Unit	95.493.600,00	44.729.500,00	30.178.300,00	-65.315.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berfaktaan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.043.000,00	0,00	0,00	-4.043.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.06.04.2.02	Inovasi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Cara Bangunan/Gedung Melindungan yang Diinvestasikan, Hanyalmantal Sistem Proteksi Kebakaran				1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Selisih(sebelum/sesudah) (10-13)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.02.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Protokol Kabupaten																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Berpotensi Viral Ungkapkan yang Diselenggarakan Kantor Humas Setelah Proses Peliputan				5 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	00 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 00 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JUMLAH									14.079.778.196,00	12.962.991.000,00	14.698.978.877,00	119.200.680.651,00							17.822.000.000,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dibuat dan dikembangkan untuk melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi sehingga perlu melakukan beberapa perubahan rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Untuk selanjutnya upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sebagai perencana pembangunan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang akurat dengan dukungan berbagai pihak secara bersama-sama melakukan hubungan kerja sama yang baik sehingga dapat menciptakan suatu pembangunan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan tepat manfaat.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN